

Seri Studi Kebudayaan 1

Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi



Editor:

Hipolitus K. Kewuel, dkk.



Program Studi Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya

SERI STUDI KEBUDAYAAN I

PLURALISME, MULTIKULTURALISME,
DAN BATAS-BATAS TOLERANSI

SERI STUDI KEBUDAYAAN I
PLURALISME, MULTIKULTURALISME,
DAN BATAS-BATAS TOLERANSI

SERI STUDI KEBUDAYAAN I

**PLURALISME, MULTIKULTURALISME,
DAN BATAS-BATAS TOLERANSI**

Editor:

Hipolitus K. Kewuel
Ary Budiyanto
Yusri Fajar

Diterbitkan oleh:

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2017

Seri Studi Kebudayaan 1

Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi

E-ISBN: 978-602-50706-0-0

Editor:

Hipolitus K. Kewuel
Ary Budiyanto
Yusri Fajar

Pracetak:

Nindyo Budi Kumoro

Desain sampul:

Achmad Cori R

Ilustrasi sampul:

Romy Setiawan

Penerbit:

Program Studi Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya

Redaksi:

Prodi Antropologi, FIB Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Malang Jawa Timur 65145
Telepon: 0341-575875
Faksimile: 0341-575822
Email: snkantroub@gmail.com
<http://fib.ub.ac.id/antropologi>

Cetakan pertama, November 2017

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Prakata	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii
PRAWACANA	
Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto	1
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.	5
BATAS-BATAS TOLERANSI DALAM MULTIKULTURALISME PENDIDIKAN	
Monthly Religious Devotion As A Practice Of Multiculturalism In Nation Star Academy Senior High School Surabaya <i>Deny Satrio Aji</i>	15
Distorsi Pendidikan Agama di Indonesia dan Integrasi Nasional? <i>Muhammad Wildan Khunaefi</i>	23
Potret Kebhinnekaan Tiga Asrama Mahasiswa di Kota Yogyakarta <i>Ernawati Purwaningsih, Sindu Galba, dan Christriyati Ariani</i>	35
Semangat Multikulturalisme dalam Permainan Tradisional Anak <i>Indrijati Soerjasih</i>	43
Bersama dalam Keberagaman (Belajar Multikulturalisme Melalui Program Kebhinekaan RRI Kendari) <i>Abdul Jalil</i>	51
Menjernihkan Pluralisme di Indonesia Modern <i>Surya Desismansyah Eka Putra</i>	59
BATAS-BATAS TOLERANSI DALAM MULTIKULTURALISME SENI	
Alms Earth And Sea as a Manifestation of Multiculturalism of Religious People <i>Dewi Rustiana dan Husnul Khotimah</i>	67
Analisis Historis dan Filosofis Makanan Tradisional Khas Cirebon dalam Perspektif Multi-etnik <i>Ahmad Yusuf Bahtiyar dan Ahmad Uly Fahmi</i>	73
Gembyung dan Kecairan Masyarakat Sumedang <i>Anny Veradiani</i>	81
Tenun Buton dalam Multikultural Wastra Nusantara <i>Wa Ode Winesty Sofyani</i>	91
Kosmopolitanisme dalam Industri Musik Dangdut Madura pada Tahun 2000-an di Situbondo <i>Panakajaya Hidayatullah</i>	103
Memahami Keberagaman Melalui Musik Dangdut <i>Michael HB Raditya</i>	113

BATAS-BATAS TOLERANSI DALAM PLURALISME AGAMA

Commitment To Diversity: Ideal Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama <i>Hipollitus Kristoforus Kewuel & Ismatul Khasanah</i>	127
Tingkat Keharmonisan Interelasi Umat Buddha Dengan Umat Islam Di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi <i>Monica Mandala Putri</i>	137
Toleransi Palsu dan Kenikmatannya <i>Andri Fransiskus Gultom</i>	147
Semangat Mencari Pengakuan dan Realitas di Lapangan: Institusionalisasi dan Praktik Agama Kaharingan dalam Transformasi Ekonomi di Pedesaan Dayak Kalimantan <i>Nindyo Budi Kumoro</i>	155
Tradisi Suroan Sebagai Ruang Toleransi Antar-Masyarakat Dusun Kutorejo Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi <i>Ary Budiyanto dan Uun Triya Tribucel</i>	169
Sikap Promordial dan Potensi Konflik dalam Masyarakat Multikultural <i>Maria Hery Pratikno</i>	179
Toleransi Historis dan Religius Masyarakat pada Wilayah Situs Peninggalan Kerajaan Singhasari: Studi Kasus di Pondok Pesantren Mifthahul Falah Bungkok Singhasari <i>Wing Setiawan</i>	187
Tingkat Keharmonisan Interelasi Umat Buddha dengan Umat Islam di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi <i>Meiladina Intan Parastika</i>	199
Harmoni Dalam Keberagaman Religi Pada Kampung Megalitik di Desa Pakraman Selung, Kintamani, Bangli <i>I Wayan Pardi</i>	213
Analisis Kerukunan antar Umat Beragama pada Masyarakat Multikultur di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur) <i>I Kadek Yudiana, Miskawi, dan I Wayan Pardi</i>	227
Al-Qur'an sebagai Huda Li Al-Naas dalam Membangun Pranata Kehidupan Pluralisme dan Multikulturalisme menuju Masyarakat Madani di Indonesia <i>Mohammad Fahrur Rozi</i>	243

BATAS-BATAS TOLERANSI DALAM MULTIKULTURALISME SOSIAL POLITIK

Politik Bahasa 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara: Kontestasi Budaya Politik dan Politik Media oleh MPR RI (Tinjauan Filsafat Analitik Bahasa) <i>Hastangka</i>	255
--	-----

SERI STUDI KEBUDAYAAN I
PLURALISME, MULTIKULTURALISME,
DAN BATAS-BATAS TOLERANSI

PRAWACANA

Sikap Promordial dan Potensi Konflik dalam Masyarakat Multikultural

Maria Heny Pratikno

Masyarakat multikultural adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu, masing-masing mempunyai sistem nilai yang diacu bersama dan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain, kecuali nilai bersama dalam konteks negara. Dalam praktek, masyarakat multikultural sarat dengan sikap, pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya sehingga membentuk sikap tertentu yang lazim disebut "Primordialis", yakni ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial, dengan hal-hal yang dibawa sejak lahir antara lain suku bangsa, ras, daerah kelahiran, klan, agama, dan sebagainya. Hal ini seperti perasaan kesukuan yang berkebutuhan. Berbagai kasus kekerasan dengan berbagai motif terjadi diberbagai tempat bermunculan bahkan menjadikan isu agama sebagai pembenaran perilaku yang keliru. Hal ini didorong oleh pemberitaan viral oleh media massa seperti TV, dan media online. Kasus-kasus pemaksaan, intimidasi, pengrusakan bahkan pembakaran rumah ibadah dan penusukan/pemukulan pendeta dan jemaat seperti yang terjadi di Bekasi, Bogor, Sawangan, Depok dan lain-lain mengakibatkan timbulnya ketakutan. Ketidaknyamanan dalam masyarakat di satu pihak dan di pihak lain bisa menyulut emosi dan merusak tatanan demokrasi serta mengganggu rasa solidaritas berkehidupan sebagai makhluk sosial. Di Kelurahan Sarongsong I, Kelurahan Sarongsong II dan Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, terdapat kehidupan masyarakat beda etnik dan budaya di tengah-tengah masyarakat penduduk asli yang mayoritas. Mereka dapat hidup bersama dengan damai tanpa ada kerusuhan masa terbuka walaupun masing-masing kelompok etnis dalam keseharian masih mempertahankan sikap-sikap primordial. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat kajian lebih mendalam dengan menggunakan penelitian kualitatif.

1. Pengertian Masyarakat Multikultural

Dalam perspektif politik Negara Indonesia dibangun atas dasar perjuangan para pahlawan pendahulu dengan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yakni walaupun berbeda tapi satu. Dari aspek sosial budaya dapat dilihat bahwasanya corak masyarakat yang berbeda-beda suku dan kebudayaan seperti tersebut diatas disebut masyarakat multikultural, yakni sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu, masing-masing mempunyai sistem nilai berbagai kesatuan yang menjadi bagian-bagiannya, sehingga para anggota masyarakat secara keseluruhan kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Model keanekaragaman seperti ini seharusnya merupakan modal dasar bagi masyarakat Indonesia dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Akan tetapi pada masa Orde Baru, keadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme bangsa Indonesia kemudian diberi penekanan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalah artikan yang mempertegas batas identitas antar individu.

Multikultural baru muncul pada tahun 1980-an, awalnya mengkritik praktik penerapan demokrasi yang hanya berlakukan pada kelompok tertentu (pejabat dan kerabatnya). Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" kehidupan orde baru yang bercorak masyarakat majemuk (*plural society*) sehingga corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Adapun acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah." Lebih jauh harus diakui bahwasanya potensi-potensi budaya yang dimiliki harus dilihat sebagai aset negara yang harus didayagunakan bagi pembangunan bangsa ke depan. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya

Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pemberdayaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri perlu dikembangkan seluas-luasnya agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa serta secara otomatis memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, misi utamanya adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa serta menjadikannya sebagai suatu sinergi nasional.

Dalam kenyataan, walaupun masyarakat multikultur telah memiliki seperangkat tata nilai yang dianggap sebagai moralitas bersama, hal ini sama sekali tidak menjamin bahwa masyarakat tersebut akan selalu hidup dalam keadaan damai. Seringkali upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan politis menghasilkan konflik politik yang lebih besar intensitasnya, namun upaya-upaya politis tersebut seharusnya tidak pernah boleh menyangkal hak-hak individual seorang pun, terutama atas dasar alasan-alasan perbedaan etnis dan agama.

2. Sikap-Sikap Primordial dalam Masyarakat Multikultural

Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah, karena masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Hanya saja, persoalannya menjadi lain jika konflik sosial yang berkembang di masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis. Akhir-akhir ini, intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat kian meningkat, terutama konflik sosial yang bersifat horisontal yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Beberapa fenomena yang merebak yang nota bene melibatkan institusi penegak hukum antara lain kasus SARA dan

isu penistaan agama serta pemaksaan kehendak oleh kelompok mayoritas yang ekstrim. Sejarah mencatat telah terjadi berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia, antara lain Ambon, Poso, Maluku, GAM di Aceh, kasus Kotapang antara orang Dayak dan Madura, kasus Jakarta tahun 2008 yang mengorbankan banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, penistaan agama bahkan politik aliran pada saat PILKADA DKI yang secara masif menggunakan label agama sehingga masyarakat seakan terpecah belah. Kian merebak kasus-kasus kekerasan dengan motif terorisme, kerusuhan antara kampung di Jakarta Selatan yang menelan korban jiwa. Kasus kerusuhan massa terbuka antar etnis di Jakarta Selatan, Penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Banten, kerusuhan dan pembakaran rumah ibadah di Temanggung, bom bunuh diri di Solo, mengangkat issue agama dalam pemenangan pilkada dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini tidak boleh dianggap remeh dan harus segera diatasi secara mendasar dan proporsional agar tidak menciptakan disintegrasi nasional. Banyak hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik tersebut. Apakah fenomena konflik ini merupakan peristiwa *incidental* dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, ataukah justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem mendasar yang belum terselesaikan menyangkut penghayatan kita terhadap agama sebagai kumpulan doktrin di satu pihak dan sikap keagamaan yang terwujud dalam perilaku kebudayaan di pihak lain. Kemajemukan masyarakat lokal seperti itu bukan saja bersifat horizontal (perbedaan etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, yaitu terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang diraihnya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat, khususnya dari etnik tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya dan menimbulkan kecamburuan sosial oleh masyarakat setempat yang mandeg perkembangan ekonominya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar *mainstream*. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik, apalagi bila ditunggangi kepentingan politik ekonomi tertentu seperti kasus-kasus kerusuhan anti etnis beberapa waktu yang lalu.

Pernyataan mendasar yang perlu direnungkan dan dicari jalan keluarnya adalah sampai sejauhmana peran negara dalam mengatur dan memberi efek jera bagi penyulut kerusuhan?

Mengacu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk agama bagi para pengikutnya hal tersebut di atas juga tidak maksimal dilakukan orang pembuat dan pelaksana karena kasus-kasus pemaksaan, intimidasi, pengrusakan bahkan pembakaran rumah ibadah dan penusukan/pemukulan pendeta dan jemaat yakni kasus Bekasi, Bogor, Sawangan, Depok dan lain-lain mengangkibat timbulnya ketakutan dari kasus-kasus kerusuhan tersebut di atas. Ketidaknyamanan dalam masyarakat di satu pihak dan di pihak lain bisa menyulut emosi dan merusak tatanan demokrasi serta mengganggu rasa solidaritas berkehidupan sebagai makhluk sosial.

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Sejak kurang lebih 80 tahun yang lalu datang dan menetap masyarakat beda etnis dan agama karena desakan kebutuhan ekonomi yakni untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang lebih layak, mengikuti kerabat atau kernalan, juga atas dasar ikatan perkawinan. Adapun kehadiran Orang Jawa, Bugis, Makassar, Sangihe dan Talaud, Gorontalo serta Maluku, Ambon dan lain-lain yang mayoritas beragama Islam, kecuali orang Sangihe dan Talaud rata-rata beragama Kristen dengan beberapa denominasi yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Advent dan Pantekosta.

Proses kedatangan hingga mereka bisa sampai di Airmadidi mereka berbentuk jaringan antara lain melalui jaringan kekerabatan karena ada saudara atau kenalan yang menetap dan bekerja di Manado. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka mengembangkan mata pencaharian disektor informal sebagai penjual mie bakso, mie ayam, es, gado-gado, ketoprak,

nasi kuning, gule dan sate, membuat dan menjual tahu dan tempe, tukang sol sepatu, pedagang pakaian dan kain Batik, kerajinan tangan kuningan, pengrajin peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Pekerjaan mereka terspesialisasi, orang Makassar mengembangkan mata pencaharian sebagai pedagang emas, pedagang pakaian jadi, usaha rumah makan dan membuka toko kelontong di pasar Airmadidi. Orang Sangihe dan Talaud bekerja di perkebunan kelapa dan pala milik warga setempat serta pekerjaan sekitar rumah tangga dan membuat serta menjual kue. Orang Gorontalo menjadi pedagang barang-barang kelontong, keperluan rumah tangga, ikan, bumbu dapur di sekitar pasar dan terminal Airmadidi. Adapun orang Maluku/Ternate keturunan China membuka usaha restoran, onderdil motor dan mobil, toko yang relative lebih besar dan lengkap. Sebenarnya pekerjaan yang mereka lakoni di Airmadidi adalah pekerjaan baru karena rata-rata di daerah asal, mereka berprofesi sebagai petani. Pola tempat tinggal mereka di pusat kota Airmadidi yaitu kelurahan Sarongsong I, kelurahan Sarongsong II. Dan kelurahan Airmadidi Atas. Awalnya mereka kost, sewa rumah, bahkan beberapa di antaranya numpang tinggal di rumah saudara atau kenalan.

Dalam perkembangan terjadi komunikasi dan interaksi yang intensif antara sesama penduduk pendatang dan penduduk setempat. Termasuk terjadinya perkawinan antar etnik dan agama. Beberapa masyarakat pendatang, karena keuletan dan mau bekerja keras, dapat membangun rumah termasuk juga membangun rumah ibadah yakni masjid serta menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Menurut pengamatan awal setelah berhasil dalam kehidupan ada kecenderungan mereka memanggil anggota kerabat yang ada di kampung halaman untuk bekerja membantu usaha dagang mereka.

Penduduk asli dapat menerima kedatangan mereka bahkan hidup bersama saling berinteraksi dilandasi oleh faktor kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang sifatnya reksipokal, artinya dari aspek ekonomi penduduk setempat memerlukan jasa penduduk pendatang dan penduduk pendatang membutuhkan upah untuk memenuhi kelangsungan hidup pribadi dan keluarga (*symbiosis mutualism*).

Dalam proses interaksi sosial masing-masing etnis mempertahankan corak perilaku budaya yang mereka anut dari tempat asal masing-masing seperti agama, bahasa, jenis makanan, bentuk interaksi serta aktivitas sosial dan budaya yang berkaitan dengan lingkaran sekitar daur hidup misalnya kelahiran, perkawinan, kematian. Sampai tahun 1992, sikap-sikap primordial sangat kental melekat dan mewarnai corak kehidupan dan interaksi sosial mereka.¹

3. Kelompok Sosial Sebagai Pengatur Masyarakat Multikultural

Sebelum terjadi konflik massa di beberapa daerah di Indonesia karena latar belakang SARA, di Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesepakatan antar pemuka-pemuka agama dari berbagai latar belakang agama untuk membentuk kelompok bernama BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama). Adapun fungsi kelompok ini adalah membangun dialog antar sesama pemeluk agama yang bernaung dalam BKSAUA dan bersilaturahmi pada hari-hari raya keagamaan Islam maupun Kristen. Ketika merebak kerusuhan massa di Ambon, Ternate, Poso, karena isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan), masing-masing kelompok etnis yang ada terutama etnis pendatang merasa was-was dan berperilaku sangat hati-hati. Kecemasan menghantui mereka, ada kekuatiran dalam diri mereka, kasus kerusuhan massa seperti di daerah lainnya terjadi di daerah Sulawesi Utara.

¹ Maria Heny Pratiknjo, 2009, "Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Mencegah Konflik Massa Terbuka" (Materi Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado di Airmadidi 15 Agustus 2009) hal. 3

Adapun fungsi kelompok ini adalah membangun dialog antar sesama pemeluk agama yang bernaung dalam BKSAUA dan bersilaturahmi pada hari-hari raya keagamaan Islam maupun Kristen. Mereka mulai membina interaksi yang intensif dalam kelompok etnis, juga antar sesama etnis pendatang, bahkan dengan penduduk setempat, walaupun cara berpikir yang sifatnya primordial, tetap mewarnai perilaku berinteraksi mereka. Hari-hari raya keagamaan Islam maupun Kristen. Akan tetapi dalam temuan penelitian penulis ketika melaksanakan FGD saat melakukan pengabdian masyarakat di Kecamatan Airmadidi terungkap bahwasannya manfaat BKSAUA² tidak menyentuh esensi kerukunan sampai pada "Grass root", hanya menjadi ajang pameran ketokohan pada saat hari raya Idul Fitri dan Natal dan hari-hari raya besar keagamaan lainnya. Dalam pengamatan awal, penulis melihat masyarakat belum merasakan manfaat BKSAUA atau dengan kata lain BKSAUA belum/tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan dalam tatanan kehidupan bernegara telah dibentuk FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) yang harus sampai di tingkat Propinsi, kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum menyentuh akar permasalahan. Menurut pengamatan penulis kebijakan tersebut diambil setelah terjadi kerusuhan massa dan berbagai tindakan anarkis dari kelompok tertentu sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Setelah issue mereda esensi masyarakat multikultur tidak di manage dengan efektif dan efisien. Menurut pemberitaan media lokal Harian Manado Post halaman 7 kol. 2 dan 3 tanggal 19 Februari 2011 "FKUB baru akan dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan padahal sudah ada peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri no.8 dan no. 9 tahun 2006 tentang pembentukan FKUB. Bagaimana dalam praktek pelaksanaannya?

4. Nilai Budaya dan Nilai Agama sebagai acuan Dalam Masyarakat Multikultural

Dalam kehidupan masyarakat Minahasa pada umumnya ajaran agama menjadi acuan perilaku mereka. Di samping itu juga mereka akrab dengan nilai budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya yakni: *maleos-leosan*, *torang samua basudara*, hukum cinta kasih dan saling tolong menolong. Dalam pengambilan keputusan Masyarakat mengedepankan pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasional.

Pada saat terjadi kerusuhan massa di Ambon, Maluku dan Poso maka banyak penduduk dari daerah rusuh mengungsi ke Manado. Fenomena tersebut membuat para tokoh masyarakat dan tokoh agama muslim di Kecamatan Airmadidi merasa perlu untuk membangun dialog yang lebih intensif dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masing-masing kelompok etnis setempat, mereka merasa perlu meningkatkan interaksi dan silaturahmi dengan semua kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Airmadidi. Pada akhir tahun 1999, dibuat kesepakatan dari tiga kelompok masyarakat beda agama yaitu dua kelompok Muslim dan satu kelompok Kristen, masing-masing mereka terdiri atas dua orang imam dari Masjid Istiqlal, dua orang pimpinan jemaat Gereja Tabita, dan dua orang imam dari Masjid Diponegoro. Lokasi mesjid dan gereja tersebut terletak di pusat kota Airmadidi yaitu kelurahan Sarongsong I (hasil pengamatan dan wawancara). Adapun hasil kesepakatan dari 3 kelompok masyarakat beda agama tersebut adalah pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat melalui pemahaman yang utuh dari nilai budaya dan agama.

Dibangunnya dialog antar umat beragama, bermaksud untuk mencapai kesamaan pandang dalam menyikapi isu-isu yang bernuansa SARA antara masyarakat beda etnis dan agama, dapat dirinci sebagai berikut:

² BKSAUA merupakan singkatan dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama merupakan institusi bentukan pemerintah antara lain berfungsi untuk menjalin kerukunan hidup umat beragama di Suawesi Utara

- Perlu dibangun diskusi dan dialog antar masyarakat beda etnis dan agama
- Perlu ditingkatkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat
- Perlu ditingkatkan kerukunan hidup dalam kehidupan sosial

Tiga poin perjanjian di atas diformulasikan dalam komitmen dengan membentuk perkumpulan yang diberi nama ISTADI. Nama tersebut merupakan akronim yang diambil dari nama masjid dan gereja dari penginisiatif (inisiator), jelasnya; IS, kata awal dari nama Masjid Istiqlal; TA, suku kata awal dari nama gereja Tabita; dan DI, suku kata awal dari nama masjid Diponegoro.

Perkumpulan ini menjadi sarana interaksi dan komunikasi masing-masing kelompok etnis dalam lingkup masyarakat multikultur yang bebas konflik massa terbuka walaupun secara nyata potensi konflik itu ada, selain itu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan hidup para anggota kelompoknya.

Pada saat pengamatan dan wawancara, ditemukan data adanya suatu sikap toleransi dan tolong-menolong pada acara kematian seorang anggota perkumpulan yang beragama Kristen. Aktivitas membangun *sabua*³ (tenda), menggali kubur dan masak-memasak dilakukan secara bersama-sama, baik oleh mereka yang beragama Kristen ataupun Islam. Pada saat pengamatan sambil lalu, penulis tidak dapat membedakan penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Nanti ketika adzan dzuhur saat anggota perkumpulan beranjak untuk sholat baniaah penulis dapat membedakannya.

Aspek ekonomi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan interaksi, mengacuh nilai-nilai sosial budaya serta rasionalitas berpikir dari masyarakat di Kecamatan Airmadidi dan merupakan indikator utama sehingga masyarakat multikultur dapat hidup berdampingan tanpa ada konflik massa terbuka walaupun sebenarnya potensi konflik itu ada. Penulis sempat melakukan wawancara sambil lalu kepada seorang ibu beragama Kristen yang berprofesi sebagai penjual kue basah di pasar Airmadidi tentang prinsip-prinsip kehidupan bersama dengan latar belakang perbedaan etnis dan agama, dengan spontan informan menjawab bahwa harus ada rasa saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Adzan subuh bagi informan tidak mengganggu kenyamanan tidur melainkan menjadi sebuah tanda bagi informan untuk segera bersiap ke pasar menjual kue.

5. Kesimpulan

1. Masyarakat multikultural adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu, masing-masing mempunyai sistem nilai yang diacuh bersama dan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain, kecuali nilai bersama dalam konteks negara. Secara faktual, Model keanekaragaman seperti ini merupakan modal dasar bagi masyarakat Indonesia karena disatukan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'.
2. Dalam proses interaksi sosial masing-masing etnis mempertahankan corak perilaku budaya yang mereka anut dari tempat asal masing-masing seperti agama, bahasa, jenis makanan, bentuk interaksi serta aktivitas sosial dan budaya yang berkaitan dengan lingkaran sekitar daur hidup misalnya kelahiran, perkawinan, kematian. Sikap-sikap primordial masyarakat

³ Bangunan tambahan semi permanen di halaman rumah keluarga yang kena musibah. Terbuat dari bahan bamboo, seng atau terpal.

pendatang tetap dipertahankan al. agama, kebiasaan makan, bahasa dan dapat diterima serta dihargai oleh masyarakat penduduk asli.

3. Bentuk dan pola interaksi masyarakat multikultural dalam kehidupan keseharian mereka didasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme. mengacuh pada nilai budaya dan nilai agama serta cara berpikir yang rasional.
4. Aksi interaksi yang dikembangkan oleh kelompok beda etnis dalam dinamika kehidupan masyarakat multikultural di Kecamatan Airmadidi mengedepankan sikap toleransi dan cara berpikir yang rasional.
5. Dalam mengelola masyarakat multikultural yang demikian dinamis maka peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dari berbagai denominasi memegang peranan yang penting, mereka membangun dialog dan membentuk organisasi bersama untuk menghimpun masyarakat beda etnis, membangun dialog dan membendung berbagai provokasi yang ada.
6. Tokoh masyarakat menjadi pola anutan masyarakat sehingga dalam masyarakat beda etnis dan agama yang masing-masing mempertahankan prinsip-prinsip primordial tidak pernah terjadi konflik masa terbuka.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. "Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan". Materi pada Seminar dan Sarasehan Nasional VIII JKAI (Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia). Medan., Tema : Menata Kehidupan Majemuk Berbasiskan Multikulturalisme. 20-25 Februari 2006.
- A.,B., Shamsul. 2001. "The Redefinition of Politics and the Transformation of Malaysian Pluralism". dalam Robert W Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press).
- Anderson, Stephen K. 2003. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* Jakarta:Rajawali Press;
- Blummer, Herbert. 1986. *Symbolik Interactionism Perspective and Method*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Embong, Abdul Rahman. 2001. *Pluralism in Postcolonial* Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism : Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press). Etzioni, Amitai, 1996. *The New Golden Rule* (New York: Basic Book).
- Geertz, Clifford. 1973. "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the Now States", dalam bukunya *Interpretation of Cultures*, New York: Basic; 1973 p. 234-254.
- Glazer, Nathan. 1967. *We Are All Multiculturalists Now*. Cambridge, Mass. :Harvard University Press.
- Hefner, Robert W (ed).2007. *Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Imaludin, Iim. 2005. Kehidupan Multi Etnik di Kota Padang, International Symposium of the Journal Anthropology Indonesia, Depok.
- Lili Weri A. 2005. *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Multikultur*.Yogyakarta : LkiS.
- Parekh, Bikhu. 2008 *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.

Pratikno, Maria Heny. 2007. "Kedudukan Wanita Manado dalam Masyarakat". Materi pada Diseminasi Modul Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa. Manado, 30 Juli - 2 Agustus 2007.

_____. 2009. "Pembinaan Generasi muda Dalam Upaya Mencegah Konflik Massa Terbuka, materi Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Manado 15 Agustus 2009.

Saefudin, Ahmad Fedyani. 1986. "Konflik dan Interaksi", di dalam Rolland Robertson (Ed.) *Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali.